**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Koperasi**
     1. **Pengertian Koperasi**

Menurut Rudianto (2010: 3) Koperasi yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sedangkan Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian yaitu (UU No.17 Th 2012) Bab I Pasal 1 di dalam Ketentuan Umumnya dijelaskan tentang pengertian dari koperasi yaitu :

Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota nya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan pengertian koperasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha atau lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya..

**2.1.2 Prinsip Koperasi**

Menurut Rudianto (2010: 4), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka.

Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

1. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan nengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

1. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.

Koperasi ini menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

1. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

1. Kemandirian.

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima di masyarakat dan agar dapat diterima di masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya memiliki prinsip untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan membantu dalam membuat keputusan, yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu koperasi dalam mencapai tujuan tersebut.

* 1. **Pengertian, Tujuan, dan Jenis Laporan Keuangan**

**2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Fahmi (2012: 25) mengemukakan bahwa “laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut”. Menurut Soemarso (2010: 368), “Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan”. Menurut Munawir (2012: 5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alas an-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu dan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

* + 1. **Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2015: 11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pedapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu,
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Rudianto (2010: 12) Tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi keuangan bagi penggunanya, baik pengguna internal maupun pngguna ekternal dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membangun para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.
   * 1. **Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2015: 9), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang dapat disusun, yaitu :

1. Neraca (*balance sheet*)

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu peursahaan.

1. Laporan laba rugi (*income statement*)

Laporan laba rugi *(income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan ddan sumber – sumber ppendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

1. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sbebab terjadinya perubahan modal diperusahaan.

1. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.

1. Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima jenis laporan keuangan yang dibuat yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan.

* 1. **Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

**2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2015: 31), yaitu : Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan operasi serta perkembangan usaha yang bersangkutan. Dengan diadakannya analisis laporan keuangan ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

* + 1. **Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2015: 68), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-keuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja menajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

**2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan keuangan**

**2.4.1 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2015: 69), terdapat dua metode analisis laporan keuangan yaitu :

1. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk bebrapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat pwerkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya.

1. Analisis Vertikal (statis)
2. Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
3. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas.
4. Estimasi biaya awal pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Menurut Munawir (2012: 36), ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap analis, yaitu :

1. Analisa Horizontal

Analisa horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis.

1. Analisa Vertikal

Analisa vertkal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

**2.4.2. Teknik Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2012: 36), teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah :

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi tetap, naik atau turun.
3. Laporan dengan persentase perkomponen atau common size statement adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentse investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan kommposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam perode tertentu.
5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analisys*) adalah suatu analaisis untuk menegtahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta pengunaan uang kas selama peeriode tertentu.
6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.
7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analisys*) adalah anailisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan denga dibudgetkan untuk periode tersebut.
8. Analisa *break even* adalah suatu anailisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dengan analisa *break even* ini juga akan diketahui bebrbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

**2.5 Analisis Rasio Keuangan**

**2.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Secara umum, analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan mendapat laba yang optimal.

Menurut Kasmir (2015: 104) mengungkapkan bahwa rasio keuangan adalah: “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan”.

Sedangkan menurut Munawir (2012: 64) analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut: “Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa ratio akan dapat menjelaskan keadaan atau memberi gamabaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard”.

**2.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

1. **Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang, sehingga berperan penting bagi kemajuan koperasi.

Menurut Hendar (2010: 203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

1. **Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Menurut Hendar (2010: 203), penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1**

**Daftar Aspek Penilaiaan Kesehatan Koperasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek yang dinilai** | **Skor** |
| 1 | Permodalan | 15% |
| 2 | Kualitas Aktiva Produktif | 25% |
| 3 | Manajemen | 15% |
| 4 | Efisiensi | 10% |
| 5 | Likuiditas | 15% |
| 6 | Kemandirian dan Pertumbuhan | 10% |
| 7 | Jatidiri Koperasi | 10% |
| Jumlah Penilaian | | 100% |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi**.** Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutamakegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa ratio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Smuatera Selatan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

**Tabel 2.2**

**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek yang dinilai** | | **Komponen** | | **Bobot Penilaian** |
| **1** | **Rasio Permodalan** | | | | **15** |
|  |  | | 1. Rasio modal sendiri terhadap total aset   x100%   1. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko   x100%   1. Rasio kecukupan modal sendiri   x100% | | 6  6  3 |
| **2** | **Rasio Manajemen** | | | | **15** |
|  |  | | 1. Manajemen Umum 2. Kelembagaan 3. Manajemen Permodalan 4. Manajemen Aktiva 5. Manajemen Likuiditas | | 3  3  3  3  3 |
| **3** | **Rasio Kualitas Aktiva Produktif** | | | | **25** |
|  |  | 1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan   x 100%   1. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan   x 100%   1. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah   x 100%   1. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan   x 100% | | | 10  5  5  5 |
| **No** | **Aspek yang dinilai** | **Komponen** | | | **Bobot Penilaian** |
| **4** | **Rasio Efisiensi** | | | | **10** |
|  |  | | 1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto   x 100%   1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor   x 100%   1. Rasio efisiensi pelayanan   x 100% | | 4  4  2 |
| **5** | **Rasio Likuiditas** | | | | **15** |
|  |  | | 1. Rasio Kas   x 100%   1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor   x 100 %  Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi | | 10  5 |
| **6** | **Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan** | | | | **10** |
|  |  | | | 1. Rentabilitas Aset   x 100 %   1. Rentabilitas modal sendiri   x 100%   1. Kemandirian operasional pelayanan   x 100% | 3  3  4 |
| **7** | **Jatidiri Koperasi** | | | | **10** |
|  |  | | 1. Rasio partisipasi bruto   x 100%   1. Rasio promosi ekonomi anggota   x 100% | | 7  3 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. **Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Palembang terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

* 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.3**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**

**Terhadap Total Aset**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 – 20 | 25 | 6 | 1.50 |
| 21 – 40 | 50 | 6 | 3.00 |
| 41 – 60 | 100 | 6 | 6,00 |
| 61 – 80 | 50 | 6 | 3.00 |
| 81 - 100 | 25 | 6 | 1,50 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

**Tabel 2.4**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap**

**Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 – 10 | 10 | 6 | 0,6 |
| 11 – 20 | 20 | 6 | 1,2 |
| 21 – 30 | 30 | 6 | 1,8 |
| 31 – 40 | 40 | 6 | 2,4 |
| 41 – 50 | 50 | 6 | 3,0 |
| 51 – 60 | 60 | 6 | 3,6 |
| 61 – 70 | 70 | 6 | 4,2 |
| 71 – 80 | 80 | 6 | 4,8 |
| 81 – 90 | 90 | 6 | 5,4 |
| 91 - 100 | 100 | 6 | 6,0 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

# Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
2. Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**
3. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.
4. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 % **Tabel 2.7**.

**Tabel 2.5**

**Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen Modal** | **Nilai (Rp)** | **Bobot Pengakuan Resiko** | **MTMR** |
| 1 | Modal Sendiri: |  |  |  |
|  | Simpanan Wajib Khusus USP | Rp | 100% | Rp |
|  | Simpanan Pokok | Rp | 100% | Rp |
|  | Simpanan Wajib | Rp | 100% | Rp |
|  | Cadangan Modal | Rp | 100% | Rp |
|  | Modal Donasi | Rp | 100% | Rp |
| 2 | Kewajiban: |  |  |  |
|  | Simpanan Manasuka | Rp | 50% | Rp |
|  | Simpanan Perumahan | Rp | 50% | Rp |
|  | Tabungan Koperasi (TAKOP) | Rp | 50% | Rp |
|  | Jasa Tabungan Koperasi | Rp | 50% | Rp |
|  | Jasa Simpanan Wajib Khusus | Rp | 50% | Rp |
|  | Hutang SHU pada Anggota | Rp | 50% | Rp |
|  | Hutang pada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta | Rp | 50% | Rp |
|  | Dana Pengurus | Rp | 50% | Rp |
|  | Dana Karyawan | Rp | 50% | Rp |
|  | Dana Pembangunan Daerah Kerja | Rp | 50% | Rp |
|  | Dana Pendidikan | Rp | 50% | Rp |
|  | Dana Sosial | Rp | 50% | Rp |
|  | Dana Penghapusan Piutang Anggota | Rp | 50% | Rp |
|  | Dana Khusus Anggota | Rp | 50% | Rp |
|  | **Modal Tertimbang Menurut Resiko** | | | **Rp** |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.6**

**Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen Modal** | **Nilai (Rp)** | **Bobot Pengakuan Resiko** | **ATMR** |
| 1 | Kas dan Setara Kas | Rp | 0 | Rp |
|  | Piutang Usaha | Rp | 100% | Rp |
|  | Piutang Lainnya | Rp | 100% | Rp |
|  | Persediaan | Rp | 100% | Rp |
|  | Jumlah Aset Tetap | Rp | 70% | Rp |
|  | Aset Tidak Lancar Lainnya | Rp |  | Rp |
|  | Simpanan pada PKP-RI Sumsel | Rp | 20% | Rp |
|  | SKPB pada IKP-RI Jakarta | Rp | 100% | Rp |
|  | Deposit Biro Perjalanan | Rp | 100% | Rp |
|  | Deposit pada PT. Finnet Indonesia | Rp | 100% | Rp |
| **Aktiva Tertimbang Menurut Risiko** | | | | **Rp** |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.7**

**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| 4 < X < 6 | 50 | 3 | 1.50 |
| 6 < X < 8 | 75 | 3 | 2.25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3.00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

* 1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah vulume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

**Tabel 2.8**

**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota**

**Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| 25 – 50 | 50 | 10 | 5,00 |
| 50 – 75 | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
2. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
3. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
4. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
5. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

RPM =

**Tabel 2.9**

**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah**

**Terhadap Pinjaman Diberikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** **(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| ≥ 45 | 0 | 5 | 0 |
| 40 < x < 45 | 10 | 5 | 0,5 |
| 30 < x < 40 | 20 | 5 | 1,0 |
| 20 < x < 30 | 40 | 5 | 2,0 |
| 10 < x < 20 | 60 | 5 | 3,0 |
| 0 < x < 10 | 80 | 5 | 4,0 |
| 0 | 100 | 5 | 5,0 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.10**

**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap**

**Risiko Pinjaman Bermasalah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** **(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 – 10 | 10 | 5 | 0,5 |
| 11 – 20 | 20 | 5 | 1,0 |
| 21 – 30 | 30 | 5 | 1,5 |
| 31 – 40 | 40 | 5 | 2,0 |
| 41 – 50 | 50 | 5 | 2,5 |
| 51 – 60 | 60 | 5 | 3,0 |
| 61 – 70 | 70 | 5 | 3,5 |
| 71 – 80 | 80 | 5 | 4,0 |
| 81 – 90 | 90 | 5 | 4,5 |
| 91 – 100 | 100 | 5 | 5,0 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.11**

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko**

**Terhadap Pinjaman yang Diberikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** **(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| > 30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26 – 30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21 – 25 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

* 1. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.12**

**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah Jawaban “Ya”** | **Nilai** | **Skor** |
| 1 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | 0,25 | 0,50 |
| 3 | 0,25 | 0,75 |
| 4 | 0,25 | 1,00 |
| 5 | 0,25 | 1,25 |
| 6 | 0,25 | 1,50 |
| 7 | 0,25 | 1,75 |
| 8 | 0,25 | 2,00 |
| 9 | 0,25 | 2,25 |
| 10 | 0,25 | 2,50 |
| 11 | 0,25 | 2,75 |
| 12 | 0,25 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.13**

**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah Jawaban “Ya”** | **Nilai** | **Skor** |
| 1 | 0,5 | 0,50 |
| 2 | 0,5 | 1,00 |
| 3 | 0,5 | 1,50 |
| 4 | 0,5 | 2,00 |
| 5 | 0,5 | 2,50 |
| 6 | 0,5 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.14**

**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah Jawaban “Ya”** | **Nilai** | **Skor** |
| 1 | 0,6 | 0,60 |
| 2 | 0,6 | 1,20 |
| 3 | 0,6 | 1,80 |
| 4 | 0,6 | 2,40 |
| 5 | 0,6 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.15**

**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah Jawaban “Ya”** | **Nilai** | **Skor** |
| 1 | 0,3 | 0,30 |
| 2 | 0,3 | 0,60 |
| 3 | 0,3 | 0,90 |
| 4 | 0,3 | 1,20 |
| 5 | 0,3 | 1,50 |
| 6 | 0,3 | 1,80 |
| 7 | 0,3 | 2,10 |
| 8 | 0,3 | 2,40 |
| 9 | 0,3 | 2,70 |
| 10 | 0,3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.16**

**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah Jawaban “Ya”** | **Nilai** | **Skor** |
| 1 | 0,6 | 0,60 |
| 2 | 0,6 | 1,20 |
| 3 | 0,6 | 1,80 |
| 4 | 0,6 | 2,40 |
| 5 | 0,6 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

* 1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah pertisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.17**

**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota**

**Terhadap Partisipasi Bruto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** **(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| > 100 | 0 | 4 | 1 |
| 95 ≤ X < 100 | 50 | 4 | 2 |
| 90 ≤ X < 95 | 75 | 4 | 3 |
| < 90 | 100 | 4 | 4 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.18**

**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha**

**Terhadap SHU Kotor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| > 80 | 25 | 4 | 1 |
| 60 ≤ X < 80 | 50 | 4 | 2 |
| 40 ≤ X < 60 | 75 | 4 | 3 |
| < 40 | 100 | 4 | 4 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**

**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** **(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| 5 < X < 10 | 75 | 2 | 1,5 |
| 10 ≤ X ≤ 15 | 50 | 2 | 1,0 |
| >15 | 0 | 2 | 0,0 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

* 1. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.20**

**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank**

**Terhadap Kewajiban Lancar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 < x < 15 | 100 | 10 | 10 |
| 15 < x < 20 | 50 | 10 | 5 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.21**

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan**

**Terhadap Dana yang Diterima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| 60 < X < 70 | 50 | 5 | 2,50 |
| 70 < X < 80 | 75 | 5 | 3,75 |
| 80 ≤ X > 90 | 100 | 5 | 5 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

* 1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.22**

**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| 5 ≤ X < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 ≤ X < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**

**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 3 | 25 | 3 | 0,75 |
| 3 ≤ X < 4 | 50 | 3 | 1,50 |
| 4 ≤ X < 5 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 5 | 100 | 3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Kemandiriran Operasional Pelayanan

Rasio kemandiriran operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.24**

**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| ≤ 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

* 1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.25**

**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| 25 x < 50 | 50 | 7 | 3,50 |
| 50 x < 75 | 75 | 7 | 5,25 |
| 75 | 100 | 7 | 7,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.26**

**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal** **(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| < 5 | 0 | 3 | 0,00 |
| 5 x < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 x < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| 10 | 100 | 3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**2.7.2. Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor dengan secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP pada **Tabel 2.27**

**Tabel 2.27**

**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

|  |  |
| --- | --- |
| **SKOR** | **PREDIKAT** |
| 80 ≤ x ≤ 100 | **SEHAT** |
| 66 ≤ x < 80 | **CUKUP SEHAT** |
| 51 ≤ x < 66 | **DALAM PENGAWASAN** |
| **<** 51 | **DALAM PENGAWASAN KHUSUS** |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

1. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
2. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
3. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
4. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.